PILIHAN RASIONAL PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DI KELURAHAN AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

M. Syawaldi Ar Rahman[1], Hesti Asriwandari[2]
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau[1,2]
m.syawaldi2730@student.unri.ac.id, asriwandari@yahoo.com

ABSTRACT

This study examines the rational considerations of micro-business actors in Kelurahan Air Tiris, Kampar District, Kampar Regency, who continue to prioritize cash payments amid the growing availability of digital payment systems. The study aims to describe the reasons underlying the choice of cash payments and the obstacles encountered in daily transactions. A descriptive qualitative approach was used. Seven informants were purposively selected, consisting of five micro-business actors, one key informant, and one supporting informant. Data were collected through non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, while credibility was examined through source, method, and time triangulation. The findings show that the preference for cash is not caused by a lack of knowledge about digital payments. Informants were familiar with bank transfers, e-wallets, and QRIS, and some had used non-cash transactions. Cash was prioritized because customer transactions were generally small, cash could be used immediately for business capital and daily needs, administrative deductions could be avoided, and sales records were considered easier to manage. In Coleman's rational choice perspective, actors possess control over their payment decisions, cash functions as a readily usable resource, and the main interests are business continuity, profit protection, operational convenience, and rapid capital circulation. Cash transactions nevertheless present obstacles, particularly shortages of change, customer debt, and calculation errors. These obstacles are managed through preparing change, exchanging denominations with neighboring traders, and using calculators and notes. Thus, cash payment is a selective and context-based rational choice rather than a simple rejection of digitalization.

Keywords: *rational choice, micro-enterprise actors, cash payment*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan rasional pelaku usaha mikro di Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang tetap memprioritaskan pembayaran tunai di tengah berkembangnya sistem pembayaran digital. Penelitian bertujuan mendeskripsikan alasan yang mendasari pilihan pembayaran tunai serta hambatan yang ditemui dalam transaksi sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara purposif sebanyak tujuh orang yang terdiri atas lima pelaku usaha mikro, satu informan kunci, dan satu informan pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi terhadap

pembayaran tunai bukan disebabkan ketidaktahuan terhadap pembayaran digital. Informan telah mengetahui transfer bank, e-wallet, dan QRIS, bahkan sebagian pernah melakukan transaksi non-tunai. Pembayaran tunai diprioritaskan karena nominal transaksi pembeli relatif kecil, uang dapat langsung digunakan untuk perputaran modal dan kebutuhan usaha, biaya administrasi dapat dihindari, serta pencatatan hasil penjualan dianggap lebih mudah. Dalam perspektif pilihan rasional Coleman, pelaku usaha memiliki kontrol dalam menentukan metode pembayaran, uang tunai menjadi sumber daya yang siap digunakan, sedangkan kepentingan utama berkaitan dengan keberlangsungan usaha, perlindungan laba, kemudahan operasional, dan kelancaran perputaran modal. Pembayaran tunai tetap memiliki hambatan berupa kekurangan uang kembalian, pembeli yang berutang, dan kesalahan perhitungan. Hambatan tersebut diatasi dengan menyiapkan uang kembalian, menukar pecahan dengan pedagang sekitar, serta menggunakan kalkulator dan nota. Dengan demikian, pembayaran tunai merupakan pilihan rasional yang bersifat selektif dan kontekstual, bukan semata-mata penolakan terhadap digitalisasi.

Kata Kunci: pilihan rasional, pelaku usaha mikro, pembayaran tunai

A. Pendahuluan

Digitalisasi sistem pembayaran telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Transfer rekening, mobile banking, e-wallet, dan QRIS menyediakan alternatif pembayaran yang semakin mudah dijumpai dalam kegiatan perdagangan. Perubahan tersebut juga menyentuh pelaku usaha mikro yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal. Meskipun pilihan pembayaran digital semakin tersedia, penggunaan pembayaran tunai tidak serta-merta hilang dari praktik perdagangan sehari-hari. Fenomena tersebut terlihat di Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tempat sebagian pelaku usaha mikro masih memprioritaskan pembayaran tunai dalam melayani konsumen.

Kelurahan Air Tiris memiliki aktivitas ekonomi yang ditopang oleh perdagangan, jasa, dan kuliner. Posisi wilayah yang dilalui jalan lintas dan kedekatannya dengan pasar membuat aktivitas jual beli berlangsung secara intensif. Pelaku usaha mikro menjalankan usaha dengan skala relatif kecil dan pada umumnya pemilik usaha terlibat langsung dalam pengelolaan transaksi, pencatatan, penyimpanan hasil penjualan, serta pengadaan kembali barang dagangan. Dalam situasi seperti ini, metode pembayaran bukan hanya persoalan teknologi, tetapi berkaitan dengan cara pelaku usaha mengelola sumber

daya dan memenuhi kepentingan usahanya.

Skripsi yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Air Tiris pada dasarnya telah mengenal pembayaran non-tunai. Informan mengetahui transfer bank, e-wallet, dan QRIS, sementara sebagian informan memiliki akses terhadap perangkat dan rekening yang memungkinkan penggunaan pembayaran digital. Namun, pengetahuan dan akses tersebut tidak secara otomatis membuat pembayaran digital menjadi pilihan utama. Pelaku usaha mempertimbangkan kondisi transaksi yang mereka hadapi, terutama nominal belanja konsumen, kebutuhan modal yang harus segera diputar, biaya administrasi, kemudahan pencatatan, serta pengalaman penggunaan metode pembayaran sebelumnya.

Temuan tersebut penting karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan keputusan untuk menggunakannya. Ekaputra et al. (2024) menunjukkan bahwa adopsi QRIS pada UMKM menghadapi tantangan dan peluang, sedangkan Utami (2025) membahas dampak adopsi pembayaran digital terhadap kinerja finansial UMKM. Penelitian Alifia et al. (2024) juga menunjukkan hubungan penggunaan QRIS dengan pendapatan UMKM. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti penggunaan atau dampak pembayaran digital. Artikel ini mengambil posisi berbeda dengan memusatkan perhatian pada alasan pelaku usaha mikro tetap memilih pembayaran tunai ketika alternatif digital telah tersedia.

Fenomena tersebut dianalisis menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman. Dalam kerangka Coleman (1990), tindakan sosial dapat dipahami dengan melihat aktor, sumber daya, kepentingan, dan kontrol. Aktor memiliki kepentingan terhadap sumber daya dan berusaha menentukan tindakan yang memungkinkan kepentingannya tercapai. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha mikro dipandang sebagai aktor yang memiliki kendali tertentu atas kegiatan usahanya, termasuk menentukan metode pembayaran yang digunakan. Uang hasil penjualan merupakan sumber daya yang berkaitan langsung dengan kepentingan keberlangsungan usaha dan perputaran modal.

Pilihan pembayaran tunai dengan demikian tidak cukup dijelaskan sebagai kebiasaan lama atau sebagai tanda bahwa pelaku usaha belum mengikuti perkembangan teknologi. Keputusan tersebut perlu dilihat sebagai hasil pertimbangan atas manfaat, biaya, risiko, dan kemudahan yang dirasakan dalam konteks usaha tertentu. Pembayaran tunai dapat memberikan kontrol langsung atas uang yang diterima, memudahkan perhitungan hasil penjualan, dan memungkinkan uang digunakan kembali untuk membeli barang dagangan. Di sisi lain, pembayaran digital dapat menghadirkan persoalan yang dirasakan pelaku usaha seperti potongan administrasi, kebutuhan memeriksa bukti transaksi, serta ketergantungan pada jaringan dan perangkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pertimbangan rasional pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembayaran tunai serta mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi dalam transaksi sehari-hari. Fokus tersebut diharapkan memberikan pemahaman bahwa keputusan menggunakan tunai atau non-tunai tidak selalu dapat dipisahkan dari karakteristik usaha, kebutuhan modal, hubungan dengan konsumen, dan kemampuan aktor mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai alasan dan pengalaman pelaku usaha mikro dalam menentukan metode pembayaran. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan penelitian berkaitan dengan pertimbangan, pengalaman, makna, dan tindakan pelaku usaha dalam situasi perdagangan sehari-hari. Desain penelitian mengikuti prinsip penelitian kualitatif yang menempatkan pengalaman informan dan konteks sosial sebagai sumber penting dalam memahami fenomena (Creswell, 2007; Nursapiah, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Informan dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha dan pengetahuan mengenai

praktik pembayaran di wilayah penelitian. Terdapat tujuh informan, yaitu lima informan utama yang merupakan pelaku usaha mikro dengan pengalaman menjalankan usaha lebih dari empat tahun, satu informan kunci yang mengetahui kondisi masyarakat dan aktivitas perdagangan setempat, serta satu informan pendukung yang memberikan gambaran dari sisi pembeli atau lingkungan transaksi.

Tabel 1. Komposisi Informan Penelitian

Kategori	Jumlah	Peran dalam penelitian
Informan utama	5	Pelaku usaha mikro dengan pengalaman usaha lebih dari empat tahun
Informan kunci	1	Memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat dan aktivitas perdagangan
Informan pendukung	1	Memberikan informasi mengenai praktik transaksi dari sisi lingkungan/pembeli
Total	7	Sumber data utama penelitian

Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat aktivitas perdagangan dan praktik transaksi secara langsung. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai pembayaran tunai dan digital, alasan memilih tunai, pengelolaan uang hasil penjualan, serta hambatan transaksi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung kegiatan penelitian. Instrumen wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, termasuk aspek aktor, sumber daya, kepentingan, kontrol, serta hambatan pembayaran tunai.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pelaku usaha, informan kunci, dan informan pendukung. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan informasi pada waktu pengumpulan data yang berbeda untuk melihat konsistensi keterangan informan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam penelitian kualitatif oleh Nursapiah (2020), melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Air Tiris. Pilihan tersebut muncul pada berbagai jenis usaha, baik perdagangan maupun usaha jasa dan kuliner. Informan kunci juga menggambarkan bahwa penggunaan pembayaran non-tunai pada toko-toko masih relatif sedikit. Temuan ini memperlihatkan bahwa tersedianya jaringan internet dan teknologi pembayaran tidak secara langsung menghasilkan perubahan perilaku pembayaran pada seluruh pelaku usaha mikro.

Hal yang paling menonjol adalah pengetahuan pelaku usaha mengenai pembayaran digital. Informan tidak berada dalam posisi sama sekali tidak mengenal teknologi. Mereka mengetahui transfer, e-wallet, dan QRIS, serta beberapa di antaranya pernah menerima pembayaran digital. Dengan demikian, pilihan tunai tidak tepat jika hanya dijelaskan sebagai ketidakmampuan menggunakan teknologi. Keputusan tersebut lebih dekat dengan penilaian terhadap kesesuaian metode pembayaran dengan kebutuhan usaha sehari-hari.

1. Pembayaran Tunai sebagai Pilihan Rasional

Pelaku usaha menilai transaksi tunai lebih sesuai dengan karakter transaksi mereka yang umumnya bernilai relatif kecil. Dalam transaksi bernominal kecil, uang diterima secara langsung sehingga pedagang dapat segera menghitung dan menggunakannya. Bagi pelaku usaha mikro, hasil penjualan bukan sekadar angka dalam catatan, tetapi sumber daya yang segera dibutuhkan untuk membeli kembali barang dagangan, membayar pemasok, memenuhi kebutuhan usaha, atau menghadapi pengeluaran mendadak. Karena itu, kecepatan penguasaan atas uang menjadi pertimbangan penting.

Riski, misalnya, menjelaskan bahwa uang hasil penjualan langsung dicatat dan ditempatkan pada laci, kemudian diputar kembali untuk membeli barang yang stoknya berkurang. Informan lain juga menjelaskan bahwa uang tunai dapat digunakan langsung ketika terdapat pemasok atau penjual barang yang datang ke tempat usaha. Dalam kondisi tersebut, pembayaran tunai dipandang praktis karena pelaku usaha tidak perlu menunggu proses

lain sebelum menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan usaha.

Dari sisi pencatatan, beberapa informan merasa uang tunai lebih mudah disinkronkan dengan catatan penjualan. Ketika uang fisik berada di tangan, jumlahnya dapat dihitung dan dibandingkan dengan catatan. Bagi pelaku usaha yang melakukan pencatatan manual, hubungan langsung antara uang yang terlihat dan catatan transaksi membantu mereka mengetahui pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Dengan demikian, uang tunai berfungsi sekaligus sebagai alat transaksi dan sumber daya yang mudah dipantau.

Pertimbangan lain adalah biaya administrasi. Informan memandang bahwa potongan pada transaksi digital, walaupun kecil dalam satu transaksi, dapat menjadi pertimbangan apabila terjadi berulang kali. Pada usaha dengan margin dan nominal transaksi yang terbatas, pelaku usaha berusaha mempertahankan penerimaan yang diperoleh dari setiap transaksi. Pembayaran tunai dipandang tidak memberikan potongan sebagaimana yang mereka bayangkan atau alami pada sebagian transaksi digital. Perhitungan tersebut memperlihatkan adanya orientasi pada perlindungan hasil usaha.

Temuan ini sesuai dengan kerangka Coleman (1990) bahwa aktor bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan terhadap sumber daya. Pelaku usaha sebagai aktor mempunyai tujuan mempertahankan dan mengembangkan usaha. Uang tunai merupakan sumber daya yang berada dekat dengan kontrol aktor, sedangkan kepentingan yang hendak dicapai berupa kelancaran usaha, perputaran modal, kemudahan operasional, dan perlindungan pendapatan. Oleh sebab itu, metode pembayaran dipilih berdasarkan seberapa jauh metode tersebut dianggap membantu pencapaian kepentingan tersebut.

2. Aktor dan Kontrol atas Metode Pembayaran

Unsur aktor terlihat dari kemampuan pelaku usaha menentukan sendiri metode pembayaran yang akan digunakan dalam usahanya. Sebagian besar informan menjadikan tunai sebagai pilihan utama, tetapi tidak seluruhnya menolak pembayaran non-tunai. Beberapa informan tetap menerima

transfer ketika pembeli tidak mempunyai uang tunai, dan terdapat informan yang menggunakan transaksi non-tunai untuk kebutuhan tertentu, terutama transaksi jarak jauh. Artinya, keputusan tidak bersifat hitam-putih antara menerima dan menolak teknologi, melainkan bersifat selektif berdasarkan situasi.

Kontrol juga terlihat pada cara pelaku usaha mengelola uang hasil penjualan. Mereka mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyimpan uang, menghitung hasil penjualan, dan menentukan kapan uang digunakan untuk membeli barang. Kontrol tersebut menjadi alasan penting mengapa pembayaran tunai dirasakan lebih nyaman. Uang yang diterima dapat dilihat, dihitung, dan diputuskan penggunaannya oleh pelaku usaha tanpa harus melalui tahapan verifikasi digital.

Dalam teori Coleman, kontrol aktor atas sumber daya tidak selalu bersifat mutlak karena terdapat sumber daya dan tindakan yang berada di bawah kendali aktor lain (Coleman, 1990). Temuan penelitian memperlihatkan kondisi tersebut ketika pelaku usaha membandingkan pembayaran tunai dengan pembayaran non-tunai. Pada pembayaran digital, keberhasilan transaksi bergantung pada jaringan, perangkat, bukti transaksi, aplikasi, dan penerimaan pihak lain. Ketergantungan tersebut membuat kontrol langsung yang dirasakan pelaku usaha menjadi lebih rendah dibandingkan pembayaran tunai.

3. Sumber Daya: Uang Tunai sebagai Modal yang Siap Digunakan

Sumber daya menjadi unsur yang sangat kuat dalam menjelaskan pilihan pembayaran. Pada skala usaha mikro, uang hasil transaksi dapat memiliki fungsi ganda sebagai penerimaan penjualan sekaligus modal untuk transaksi berikutnya. Informan menjelaskan bahwa uang tunai dapat langsung digunakan ketika membutuhkan barang dagangan, terutama ketika kebutuhan muncul secara mendadak. Kondisi ini membuat likuiditas uang fisik memiliki nilai praktis bagi pelaku usaha.

Sumber daya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga mencakup kemampuan pelaku usaha dalam mengelola catatan dan aktivitas perdagangan. Sebagian informan telah terbiasa mencatat barang yang terjual, barang yang perlu dibeli kembali, dan pemasukan serta pengeluaran. Kebiasaan tersebut

membuat pembayaran tunai mudah diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan usaha yang telah mereka bangun. Dengan kata lain, metode pembayaran dipilih bukan di ruang kosong, tetapi menyesuaikan dengan sumber daya, kebiasaan, dan keterampilan yang sudah tersedia.

Di sisi lain, akses terhadap teknologi tidak otomatis menjadi sumber daya yang lebih bernilai bagi semua informan. Beberapa informan memiliki telepon seluler dan akses terhadap rekening atau layanan digital, tetapi tetap tidak menjadikan pembayaran digital sebagai prioritas. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai suatu sumber daya ditentukan oleh relevansinya dengan kepentingan aktor. Teknologi dapat tersedia, tetapi jika uang tunai dianggap lebih langsung memenuhi kebutuhan modal dan operasional, maka tunai tetap dipilih.

4. Kepentingan: Keberlangsungan Usaha, Laba, dan Perputaran Modal

Kepentingan pelaku usaha dalam menggunakan pembayaran tunai berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Tujuan menjalankan usaha adalah memperoleh keuntungan dan menjaga agar modal terus berputar. Uang yang diterima dari pembeli dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai hasil transaksi tetapi juga sebagai bagian dari siklus usaha. Dalam konteks ini, pembayaran tunai dinilai membantu menjaga kesinambungan antara penjualan dan pengadaan barang.

Perlindungan laba juga muncul sebagai pertimbangan. Pelaku usaha memperhatikan potongan biaya yang dapat mengurangi penerimaan. Walaupun nominal potongan dianggap kecil, informan menilai akumulasi potongan dapat menjadi beban bagi usaha dengan transaksi berulang. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya melihat kemudahan transaksi, tetapi juga konsekuensi ekonomi dari metode pembayaran.

Kepentingan lain adalah fleksibilitas dalam melayani pembeli dan memenuhi kebutuhan pemasok. Uang tunai dapat digunakan untuk membayar barang ketika pemasok datang langsung. Selain itu, transaksi tunai dianggap tidak bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menyesuaikan metode pembayaran

dengan kebutuhan transaksi yang berbeda tanpa harus meninggalkan prioritas terhadap uang fisik.

5. Hambatan Pembayaran Tunai dan Cara Mengatasinya

Pembayaran tunai bukan tanpa hambatan. Hambatan yang ditemukan meliputi kekurangan uang kembalian, pembeli yang melakukan transaksi secara berutang, serta kesalahan perhitungan uang. Hambatan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap kegiatan usaha. Kekurangan uang kecil dapat membuat transaksi tertunda atau mengharuskan pedagang mencari pecahan ke tempat lain. Utang pembeli dapat menunda penerimaan uang yang seharusnya segera masuk ke dalam perputaran modal. Kesalahan menghitung juga berpotensi mengurangi penerimaan atau bahkan mengambil sebagian modal usaha.

Tabel 2. Pertimbangan dan Hambatan Pembayaran dalam Temuan Penelitian

Aspek	Temuan utama	Respons pelaku usaha
Nominal transaksi	Transaksi konsumen relatif kecil sehingga tunai dianggap praktis	Memprioritaskan tunai; menerima non-tunai pada kondisi tertentu
Perputaran modal	Uang hasil penjualan dapat langsung digunakan kembali	Mencatat dan menyimpan uang untuk pembelian barang
Biaya	Potongan/biaya administrasi digital dipertimbangkan	Memilih tunai untuk menjaga penerimaan
Pencatatan	Uang fisik mudah dihitung dan dibandingkan dengan catatan	Menggunakan buku catatan, kalkulator, dan nota
Uang kembalian	Pecahan kecil kadang tidak tersedia	Menyiapkan uang kecil dan menukar pecahan dengan pedagang sekitar
Perhitungan	Kesalahan hitung dapat terjadi saat lelah atau kurang teliti	Meningkatkan ketelitian dan menggunakan alat hitung
Pembeli berutang	Pembayaran tertunda dapat menghambat perputaran modal	Sebagian pedagang membatasi atau tidak memberikan utang

Pelaku usaha memiliki strategi praktis untuk mengatasi hambatan tersebut. Sebagian menyiapkan uang kembalian sejak awal aktivitas perdagangan. Jika pecahan tidak tersedia, pedagang dapat menukar uang dengan pedagang atau toko di sekitar. Dalam transaksi tertentu, kekurangan pecahan dapat disiasati dengan meminta pembeli mengambil barang lain dengan nilai yang sesuai. Untuk mencegah kesalahan perhitungan, pelaku usaha menggunakan kalkulator dan nota

serta berusaha lebih teliti dalam menghitung uang.

Menariknya, hambatan pembayaran tunai tersebut masih dipandang dapat dikendalikan oleh pelaku usaha. Mereka memiliki ruang untuk mengambil tindakan langsung ketika terjadi masalah. Hal ini berbeda dengan beberapa hambatan pembayaran non-tunai yang bergantung pada jaringan, kuota, bukti transaksi, aplikasi, atau sistem pihak lain. Riski dan informan pendukung Yuga, misalnya, menunjukkan bahwa transaksi non-tunai dapat melambat ketika jaringan atau kuota bermasalah, sementara pemeriksaan bukti transaksi dapat menambah waktu pelayanan. Perbedaan kemampuan mengendalikan hambatan inilah yang memperkuat preferensi terhadap tunai.

6. Perbandingan Rasionalitas Tunai dan Non-Tunai

Temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa pembayaran tunai selalu lebih baik daripada pembayaran non-tunai. Yang ditemukan adalah bahwa pelaku usaha menilai pembayaran tunai lebih sesuai dengan konteks usaha mereka. Pembayaran digital tetap digunakan pada kondisi tertentu, terutama ketika transaksi jarak jauh atau ketika pembeli tidak memiliki uang tunai. Artinya, rasionalitas yang ditemukan bersifat situasional. Aktor memilih metode yang menurut penilaiannya paling sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Pembayaran tunai mempunyai kelebihan berupa kontrol langsung, penggunaan segera, dan pencatatan yang dianggap sederhana. Kekurangannya berupa kebutuhan menyediakan uang kembalian, risiko salah hitung, serta kemungkinan tertundanya penerimaan ketika pembeli berutang. Pembayaran non-tunai memiliki kelebihan berupa kemudahan transaksi tertentu dan kemampuan melakukan pembayaran tanpa uang fisik, tetapi informan mengidentifikasi ketergantungan pada jaringan, kebutuhan memeriksa bukti transaksi, dan pertimbangan biaya sebagai hambatan. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa aktor melakukan kalkulasi berdasarkan situasi konkret.

Dengan demikian, pilihan pembayaran tunai dapat dibaca sebagai tindakan rasional dalam pengertian Coleman. Aktor tidak sekadar mengikuti kebiasaan, tetapi

menggunakan pengalaman, sumber daya, dan penilaiannya untuk menentukan tindakan. Kebiasaan memang menjadi bagian dari konteks, tetapi keputusan tetap berkaitan dengan kepentingan yang ingin dicapai. Ketika uang tunai dinilai mampu menjaga perputaran modal, memudahkan pencatatan, menghindari biaya tertentu, dan memberi kontrol langsung, maka tunai menjadi pilihan yang dianggap paling sesuai.

Temuan tersebut sekaligus memperluas pemahaman mengenai digitalisasi usaha mikro. Ketersediaan infrastruktur digital merupakan kondisi penting, tetapi adopsi teknologi juga dipengaruhi oleh pertimbangan aktor. Program digitalisasi yang hanya menekankan ketersediaan teknologi belum tentu mengubah metode pembayaran apabila manfaat yang dirasakan pelaku usaha belum sebanding dengan biaya, risiko, atau perubahan kebiasaan yang harus mereka hadapi. Karena itu, pemahaman mengenai rasionalitas pelaku usaha penting dalam merancang pendekatan digitalisasi yang lebih kontekstual.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Kelurahan Air Tiris memiliki kecenderungan kuat untuk memprioritaskan pembayaran tunai, meskipun mereka telah mengetahui keberadaan dan penggunaan pembayaran digital seperti transfer, e-wallet, dan QRIS. Pilihan tersebut bukan semata-mata menunjukkan ketertinggalan teknologi. Pelaku usaha mempertimbangkan karakter transaksi yang umumnya bernominal relatif kecil, kebutuhan menggunakan uang secara langsung untuk perputaran modal dan kebutuhan usaha, pertimbangan biaya administrasi, serta kemudahan pencatatan hasil penjualan.

Dalam perspektif pilihan rasional James S. Coleman, pelaku usaha berperan sebagai aktor yang memiliki kontrol atas metode pembayaran dalam usahanya. Uang tunai menjadi sumber daya yang siap digunakan, sementara kepentingan utama berkaitan dengan keberlangsungan usaha, perlindungan laba, kemudahan operasional, dan kelancaran perputaran modal. Keempat unsur tersebut saling berhubungan dalam membentuk keputusan pembayaran

tunai. Namun, pilihan tunai tidak bersifat mutlak karena sebagian pelaku usaha tetap menerima pembayaran non-tunai pada kondisi tertentu.

Pembayaran tunai juga memiliki hambatan, terutama kekurangan uang kembalian, pembeli yang berutang, dan kesalahan dalam menghitung uang. Hambatan tersebut diatasi dengan menyiapkan uang kecil, menukar pecahan dengan pedagang sekitar, menggunakan kalkulator dan nota, serta meningkatkan ketelitian. Sementara itu, hambatan pembayaran non-tunai yang ditemukan berkaitan dengan ketergantungan pada jaringan atau kuota, kebutuhan memeriksa bukti transaksi, dan keterbatasan penerimaan dari mitra transaksi. Pelaku usaha cenderung memilih tunai karena hambatan yang mereka hadapi dinilai lebih dapat dikendalikan secara langsung.

Berdasarkan temuan tersebut, digitalisasi pembayaran pada usaha mikro sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan kepentingan pelaku usaha, bukan hanya mendorong penggunaan teknologi. Bagi pelaku usaha, pengelolaan uang, pencatatan, dan pengendalian risiko perlu terus diperhatikan baik dalam transaksi tunai maupun non-tunai. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat memperluas perbandingan antarwilayah atau membandingkan usaha mikro berdasarkan sektor usaha dan karakteristik transaksi untuk melihat variasi rasionalitas dalam memilih metode pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, D. T. W. (2021). Bisnis Mikro Kecil dan Menengah. Literasi Nusantara Abadi.

Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE), 9, 102–115. https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9940

Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Harvard University Press.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Qualitative and mixed-method approaches. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8116-3.ch010

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2024). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Quality & Quantity, 58(1), 1011–1013.

Denzin, N. K. (2017). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Routledge.

Ekaputra, S. P., Ciptosari, F., & Halim, T. (2024). Adopsi teknologi pembayaran digital QRIS di kalangan UMKM Labuan Bajo:

Tantangan dan peluang. Jurnal Akademisi Vokasi, 3(2), 1–13. https://doi.org/10.63604/javok.v3i2.138

Erika, S., Wahyudi, M. R., Maharani, N. B., & Nofirda, F. A. (2023). Analisis pembayaran dengan menggunakan sistem QRIS untuk meningkatkan kinerja UMKM di Pekanbaru.

Firdaus, H., Buono, A., & Syarief, R. (2025). Strategi UMKM dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital di Kota Bogor. 20(1), 7–15.

Handayani, N. L. P., & Soeparan, P. F. (2022). Peran sistem pembayaran digital dalam revitalisasi UMKM. Transformasi: Journal of Economics and Business Management, 1(3), 20–32. https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425

Indonesia, B. (2025a). Menjaga keamanan di tengah kenyamanan transaksi digital. Bank Indonesia.

Indonesia, B. (2025b). Sistem pembayaran & pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia.

Khairunnisa, L., Harmadji, D. E., Ristiyana, R., Harto, B., Mekaniwati, A., Widjaja, W., Malau, N. A., Nur Hayati, T. P., Faried, A. I., Purwanti, T., & Umar A, M. (2022). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Krisna, A. E. (2024). Transformasi UMKM melalui industri kreatif: Pendekatan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen, 3(4), 66–81.

Mahmud. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif. Perekonomian Indonesia.

Maslaka, K., & Evanthi, A. (2024). Implementasi sistem pembayaran digital bagi UMKM pada Bazar Ragam Rasa di Kota Lama Surabaya. Community Development Journal, 5(6), 12672–12676.

Naamy, N. (2019). Metodologi Penelitian Dasar-Dasar & Aplikasinya.

Nasih, A. M., Gati, V., & Rahayu, S. (2024). Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kepercayaan, persepsi risiko dan persepsi hambatan terhadap minat menggunakan QRIS yang dimediasi oleh sikap terhadap QRIS. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 12, 302–316. https://doi.org/10.26740/akunesa

Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ritzer, G. (2010). Sociological Theory. In Encyclopedia of Social Theory. https://doi.org/10.4135/9781412952552.n87

Saleh, I., Wardana, A., & Mariyati, L. (2023). Inklusi keuangan perbankan syariah berbasis digital-banking: Optimalisasi dan tantangan. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1), 42–56. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta R&D. Alfabeta.

Utami, N. (2025). Adopsi pembayaran digital melalui QRIS dan dampaknya terhadap kinerja finansial UMKM. Jurnal Transaksi (Atma Jaya), 9(2), 1–13.

Wa Ikhsan, M., & Widodo, T. (2025). Upaya mendorong pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran pedagang Car Free Day Pekanbaru. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(5), 1957.